

---

**UNHCR News**

HQP100  
P.O. Box 2500  
CH-1211 Geneva 2  
Tel +41 22 739 85 02  
Fax +41 22 739 73 14  
www.unhcr.org  
@RefugeesMedia

---

---

**PLACE: Jakarta, Indonesia**

**DATE: 14 November 2016**

---

**UNHCR puji Filipina, Indonesia dan Thailand diantara negara – negara ASEAN dalam menangani keadaan tanpa kewarganegaraan**

Kantor PBB untuk urusan pengungsi menyambut baik kemajuan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam mengkonfirmasi kewarganegaraan dari sekitar hampir 3,000 orang berketurunan Indonesia yang tinggal di Filipina Selatan. Ini adalah salah satu dari langkah – langkah positif yang diambil oleh negara ASEAN sejak peluncuran kampanye global untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan di tahun 2024.

Volker Türk, Asisten Komisioner Tinggi UNHCR untuk Perlindungan, berkomentar di acara diskusi panel di Jakarta hari ini yang berjudul “Hak atas kewarganegaraan dan mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan di ASEAN.”

Sejak UNHCR meluncurkan kampanye #IBelong dua tahun yang lalu, negara anggota ASEAN membuat kemajuan nyata yang dapat diukur dalam mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan, dengan puluhan ribu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan memperoleh kewarganegaraan dan beberapa komitmen kebijakan baru serta inisiatif - inisiatif untuk mencapai tujuan mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan,” ucap Türk. “Kerjasama antara Indonesia dan Filipina adalah contoh yang baik bagaimana Negara dapat bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan global ini.”

Berdasarkan definisinya, orang yang tidak punya kewarganegaraan tidak dipertimbangkan sebagai warga negara oleh negara apapun. Akibatnya, mereka sering menjumpai permasalahan ketika mengakses hak – hak dan pelayanan dasar serta dalam proses integrasi dengan masyarakat. Data terakhir menunjukkan adanya 3.7 juta orang tanpa kewarganegaraan dalam 78 negara, sementara UNHCR memperkirakan setidaknya 10 juta orang secara global dapat menjadi *stateless*.

Menurut data yang dilaporkan pada akhir 2015, 40 persen dari orang – orang di dunia yang tanpa kewarganegaraan - lebih dari 1.4 juta orang – tinggal di Asia Tenggara. Ini termasuk populasi yang terkena dampak di Myanmar (diperkirakan sekitar 938,000 orang, tidak termasuk mereka yang secara internal mengungsi), Thailand (443,862 orang), Brunei (20,524 orang), Malaysia (11,689 orang), Vietnam (diperkirakan sekitar 11,000 orang) dan Filipina (7,138 orang).

Penyebab dari keadaan tanpa kewarganegaraan bermacam-macam di tiap negara. Kekurangan atau konflik dalam hukum kewarganegaraan adalah penyebab kunci, seringkali menghalangi anak – anak dalam menyadari hak – hak mereka untuk memiliki kewarganegaraan. Di beberapa negara, diskriminasi dalam hukum kewarganegaraan dapat menyebabkan keadaan tanpa kewarganegaraan, contohnya saat seorang perempuan tidak dapat menurunkan kewarganegaraanya kepada anaknya. Pada kasus lain, kurangnya akta kelahiran dan akibatnya kesulitan untuk mendapatkan dokumentasi identitas dari generasi ke generasi,

---

**UNHCR News**

HQP100  
P.O. Box 2500  
CH-1211 Geneva 2  
Tel +41 22 739 85 02  
Fax +41 22 739 73 14  
www.unhcr.org  
@RefugeesMedia

---

menyulitkan orang dan suatu komunitas dalam menunjukkan bahwa mereka berhak akan kewarganegaraan dibawah hukum. Meskipun demikian, keadaan tanpa kewarganegaraan adalah pemasalahan yang disebabkan oleh manusia, dan dapat diatasi.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah – pemerintah di kawasan ini telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mencoba mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan. Pada tahun ini, kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina telah berhasil mengkonfirmasi kewarganegaraan dari 2,957 orang keturunan Indonesia – termasuk diantaranya 1,226 anak – anak – yang tinggal di Mindanao Selatan. Ini berarti mereka akhirnya dapat menikmati hak dan keuntungan dari memiliki kewarganegaraan.

Thailand, yang merupakan bagian dari kelompok Negara - negara “Teman Kampanye untuk mengakhiri Keadaan Tanpa Kewarganegaraan”, telah mengadopsi tujuan untuk mencapai jumlah nol untuk keadaan tanpa kewarganegaraan. Upaya terpadu telah menolong lebih dari 23,000 orang tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Thailand dalam empat tahun terakhir.

Selain itu, pemerintah Kerajaan Thailand tahun ini meminta semua wilayah dari negara untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan status legal untuk pelajar tanpa warganegara yang berhak dalam database mereka – sebuah gerakan yang dapat menguntungkan 65,000 pelajar, disamping klarifikasi prosedur untuk memfasilitasi pemrosesan aplikasi yang diajukan oleh orang tanpa kewarganegaraan. Di bulan September, pihak otoritas juga memperkenalkan regulasi khusus dalam Undang - undang Keimigrasian untuk memperluas kebebasan pergerakan orang tanpa kewarganegaraan dari wilayah dimana mereka tinggal hingga ke seluruh provinsi, yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap hak dan pelayanan seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya akan memfasilitasi pengintegrasian mereka ke dalam masyarakat Thailand.

UNHCR mendukung LSM *Adventist Relief and Development Agency (ADRA)* untuk membuka “Pusat Layanan” di beberapa sekolah yang berbeda di Propinsi Chiang Rai di Thailand Utara, dimana pelajar tanpa kewarganegaraan dan keluarga mereka dapat memperoleh informasi mengenai kewarganegaraan dan pada gilirannya dapat mengajukan aplikasi untuk pencatatan kelahiran, kewarganegaraan, tempat tinggal permanen dan dokumentasi yang berkaitan dengan status sipil.

Proyek ini menolong Manee, 39, orang tua tunggal dengan 2 anak dari suku pegunungan Lahu untuk mendapatkan kewarganegaraan Thailand bulan lalu. “Saya sudah mendapatkan ketenangan dan saya akan selalu menyimpan kartu identitas kewarganegaraan Thailand saya mulai sekarang”, ucapnya. “Saya akan memperoleh lebih banyak hak dan saya akan menggunakan hak pilih saya dalam tiap pemilihan dimana saya dapat berpartisipasi. Saya juga dapat berpindah dengan bebas untuk menemui sepupu saya manakala saya menginginkannya. Dan saya akhirnya dapat memanfaatkan pelayanan publik yang juga bermanfaat untuk anak - anak saya.”

Di Malaysia, warga sipil memainkan peran yang sangat krusial dalam melibatkan kelompok yang terkena dampak dan dalam menyelesaikan permasalahan

---

**UNHCR News**

HQP100  
P.O. Box 2500  
CH-1211 Geneva 2  
Tel +41 22 739 85 02  
Fax +41 22 739 73 14  
www.unhcr.org  
@RefugeesMedia

---

dokumentasi. Lebih dari 700 orang tanpa kewarganegaraan telah diberikan kewarganegaraan Malaysia dalam tahun ini berkat pertolongan mitra UNHCR, *Development of Human Resources in Rural Asia* (DHRRA). UNHCR juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran anak - anak, guru, pelajar dan pengajar melalui berbagai sistem pengajaran dan workshop – workshop di Universitas, serta pemberian dukungan bagi kampanye - kampanye LSM seperti dalam wadah media sosial yang bertajuk “*Journey to Belong*” dan kampanye “*Bring to Light/stateless children*”.

UNHCR menyambut kemitraan baru yang sedang digarap. Anak - anak akan menjadi fokus dari “Koalisi Hak Kewarganegaraan Tiap Anak”, sebuah inisiatif masyarakat sipil gabungan UNHCR – UNICEF yang akan diluncurkan pada tanggal 8 December 2016 dalam Dialog Perlindungan Komisioner Tinggi UNHCR berjudul “Anak – anak dalam Perpindahan” (*Children on the Move*) di Jenewa.

“Dalam kerja kami di Asia Timur dan Pasifik, kami melihat anak yang tidak dapat memiliki kewarganegaraan, juga tidak dapat memperoleh hak – hak mereka yang paling mendasar,” ucap Penasihat Perlindungan Anak Regional UNICEF, Stephen Blight. “Keadaan tanpa kewarganegaraan menjatuhkan anak dalam keadaan termarginalisasi dan kerentanan seumur hidup, yang dapat berlanjut bagi generasi selanjutnya. Pencatatan kelahiran adalah perlengkapan yang vital untuk melindungi anak dari situasi tersebut dan untuk menutup kesenjangan keadilan – sangatlah penting untuk mengatasi dan melawan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak - anak.”

Pentingnya mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan melalui pencatatan akta kelahiran ditekankan dalam Deklarasi Menteri yang diadopsi oleh 44 negara di Asia Pasifik pada bulan November 2014. Negara-negara menyetujui tujuan dari pencatatan sipil universal dan sistem statistik vital 2024 serta untuk mengatasi kesenjangan pencatatan sipil untuk kelompok “yang sulit dicapai” dan kelompok marjinal, termasuk orang - orang tanpa kewarganegaraan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG*) yang menyajikan kerangka pembangunan global, menyadari bahwa sangatlah penting untuk tidak meninggalkan satu orang pun, termasuk dalam memperoleh identitas legal untuk semua, dan dalam pencatatan kelahiran sebelum tahun 2030.

Dalam tingkat regional, Komisi ASEAN untuk Pempromosian dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) menyetujui pada bulan Oktober untuk mengikutsertakan sebuah proyek kewarganegaraan untuk perempuan dan anak - anak serta pembangunan komunitas ASEAN dalam rencana kerja mereka periode 2016-2020. Hal ini akan mencakup beberapa seri workshop regional dan konsultasi yang akan diselenggarakan oleh Perwakilan Vietnam untuk komisi tersebut serta UNHCR yang telah dimulai sejak 2013.

“Proyek ACWC akan menjadi wadah baru untuk negara - negara ASEAN dalam mengidentifikasi dan berbagi praktek - praktek terbaik, untuk belajar dari rekan -rekan yang relevan, serta untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional dalam merealisasikan lebih jauh hak kewarganegaraan untuk perempuan dan anak - anak di kawasan ASEAN. “Upaya ini dapat membantu merealisasikan Visi

---

Komunitas ASEAN tahun 2025,” ucap Yang Terhormat Lily Purba, Perwakilan Indonesia untuk Hak - hak Perempuan dan Ketua ACWC.

**UNHCR News**

HQP100  
P.O. Box 2500  
CH-1211 Geneva 2  
Tel +41 22 739 85 02  
Fax +41 22 739 73 14  
[www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)  
[@RefugeesMedia](#)

---

\*\*\*